

UPAYA KAMPUNG BERUMBUNG BARU MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KEAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Oleh : Sigit Pramono

Email : sigitpurnomo1211@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Good governance is a governance that comes from participation in which managed by people through democratic institutions that are legitimate, accountable and transparent and are used responsively for the benefit of the community. To realize good governance in Dayun District Siak Regency, The efforts of Berumbung Baru first attempt to evaluate the level of governance, territory and society through instrument village development in accordance with the mandate of the minister of Home Affairs Regulation Number 81 of 2015 concerning Evaluation of Village Development. Evaluation of village development can be identified in village competitions held annually by the ministry of Home Affairs the Republic of Indonesia through the Directorate General of Village Government Development. The theoretical concept used in this study is the Principle of good governance according to Santoso in which explains that the ideal concept of good governance is good governance derived from the principles of participation, accountability, transparency and responsiveness for the benefit of the community. This study aims to find out about the efforts of Berumbung Baru Village realizing good governance in Dayun District, Siak Regency. This study uses qualitative research methods and descriptive assessment of the data. Data collection techniques are using interview, observation and documentation techniques that involve informants as the source of information. The result showed that the efforts of Kampung Berumbung Baru for realizing good governance had been maximized. This can be seen from the various achievements achieved by Berumbung Baru Village both at the Village and National levels and the National level with the crowning of the Berumbung Baru Village as the lab site location for the model of village and sub-district development throughout Indonesia. Success factors for Berumbung Baru Village realizing good governance include the leadership of the Village Head and the Potential of Berumbung Baru Village.

Keywords: *Good governance, principle good governance, lab site*

PENDAHULUAN

Wujud konkrit keberhasilan kesejahteraan desa dibanyak bidang bisa terjadi jika tata kelola pemerintahan desa memiliki revolusi mental dalam bentuk perubahan relatif cepat dalam berfikir dan merespon serta memiliki integritas, kerja keras, gotong royong, dan pelayanan dalam wadah pemerintahan desa. Oleh karena itu mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat dari desa ke desa dapat terlaksana melalui praktek baik tata kelola pemerintahan yang disebut *good governance*.

Momentum desa untuk berupaya mewujudkan praktek *good governance*, sangatlah perlu untuk dievaluasi perkembangannya. Pentingnya evaluasi perkembangan desa adalah untuk mengetahui efektifitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen-instrumen evaluasi perkembangan desa. Evaluasi tersebut dapat diketahui melalui ajang lomba desa yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Pemerintah Desa. Hal ini dapat diartikan sebagai rangkaian yang perlu disiapkan bagi setiap desa untuk terus melakukan perbaikan dan masuk kategori pemenang lomba desa.

Adapun tujuan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi, menilai dan mendorong pemerintah desa

dan kelurahan bersama masyarakat untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya.

2. Mengetahui capaian yang ada di desa dan kelurahan selama kurun waktu dua tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa dan kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan.
3. Sebagai wadah apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa penghargaan kepada pemerintah desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan desa dan kelurahan.

Salah satu desa yang ada di Provinsi Riau yang dikategorikan berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan kearah *good governance* melalui evaluasi pembangunan desa ialah Kampung Berumbung Baru. Kampung Berumbung Baru merupakan salah satu kampung dari 11 kampung yang ada di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang terletak membujur dari arah barat ke timur. Adapun batas utara bersebelahan dengan Kampung Lubuk Tilan, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Banjar Seminai, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Teluk Merbau dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Dayun. Kampung Berumbung Baru memiliki luas wilayah 1.311 hektar.

Kampung Berumbung Baru memiliki jumlah penduduk 2.166 jiwa (2019) dengan jumlah laki-laki

1.151 dan perempuan 1.015 jiwa tercatat telah memiliki banyak prestasi dalam bidang pembangunan. Keberhasilan yang paling menonjol bagi sebuah kampung yang mayoritas penduduknya sebagai petani kelapa sawit adalah berhasil menjadi juara I lomba desa tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan bahkan tingkat Nasional pada tahun 2015. Kemudian, Pemerintah melalui evaluasi perkembangan desa dalam ajang lomba desa, Kampung Berumbung Baru dinobatkan sebagai lokasi *Labsite* untuk model pembangunan desa lainnya yang masih belum berkembang.

Regulasi adanya lomba desa ini dimulai pada tahun 2007 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan, namun seiringnya waktu peraturan tersebut mengalami perubahan dan dianggap tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Kriteria penilaian meliputi tiga bidang, yaitu bidang Pemerintahan, bidang Kewilayahan dan bidang kemasyarakatan.

Kriteria penetapan Kampung Berumbung Baru sebagai kampung terbaik nasional melalui ajang lomba desa sangat berhubungan erat dengan *good governance*. *Good governance* adalah suatu tata pemerintahan yang berasal dari partisipasi yang dikelola oleh rakyat melalui institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan serta dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat.

Adapun Penetapan juara lomba desa dan kelurahan memperhatikan hal berikut:

1. Tingkat kepatuhan Desa atau Kelurahan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan suatu akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya Desa atau Kelurahan dalam melestarikan adat dan budaya setempat. Tradisi gotong royong merupakan ciri khas adat serta budaya yang identik dengan warga pedesaan. Hal ini merupakan keharusan penyelenggaraan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip *good governance*.
3. Visi dan misi dalam membangun desa atau kelurahan.
4. Sinergitas program kegiatan desa atau kelurahan dengan program kegiatan yang ada di kecamatan.
5. Memiliki inovasi atau terobosan serta menarik dan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilahirkan sebagai respon atas persoalan dan potensi yang ada. Responsivitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yakni kemampuan dalam menerima

dalam merealisasikan segala aspirasi masyarakat.

6. Memiliki produk unggulan yang yang berdaya saing tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan yang dimaksud merupakan hasil dari kemampuan (responsivitas) tata kelola pemerintahan.

Dari pemaparan permasalahan diatas, Kampung Berumbung Baru sebagai kampung percontohan diharapkan menjadi motivasi bagi kampung atau desa lain dengan segala potensi yang ada sesuai indikator keberhasilan dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015. Sebagai lokasi *Labsite* untuk model pembangunan desa, upaya-upaya inovatif yang telah dilakukan Kampung Berumbung Baru dalam mewujudkan *good governance* antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
2. Meningkatkan inovasi pengelolaan keuangan desa yang berkualitas secara akuntabel dan transparan.
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kemasyarakatan.
4. Inovasi sistem pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Peningkatan Pendidikan Masyarakat.
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
8. Menciptakan produk unggulan desa yang berdaya saing tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Upaya Kampung Berumbung Baru Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak**”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan gejala permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok yang akan dijadikan arahan serta pedoman dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah Upaya Kampung Berumbung Baru dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Kampung Berumbung Baru Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

KONSEP TEORI

1. *Good Governance*

Menurut **Rochman (2009:276)** memberikan pengertian *governance* sebagai pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan negara dan sektor non pemerintahan dalam suatu usaha kolektif. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan, kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut **Hasibuan (2008:45)** menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga

menciptakan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan *civil society* yang mandiri.

Good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri (Sedarmayanti, 2012:2).

2. Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Santoso (2008:98) menjelaskan bahwa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* maka dapat meningkatkan kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut:

“Secara lebih sempurna lagi sesuai harapan masyarakat sekaligus tantangan zaman, harus ditambah dengan berkomitmen dan integritas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala kreativitas dan inovasinya ketika bekerja. Jelas suatu integritas, komitmen dan tanggung jawab merupakan bahasa lain sebagai bagian dari *good governance* yang merupakan tuntutan masyarakat

madani (demokratis), desentralistis dan modern serta multikultural Indonesia”.

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik Santoso (2008:20) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan responsivitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah didasari fenomena-fenomena yang peneliti temukan di lapangan. Dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017-2019. Adapun rincian kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Proposal	: Mei 2017
Perizinan	: Juli 2017
Pengumpulan data	: Januari 2019
Analisis data	: Oktober 2019

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian antara lain:

- a. Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan secara mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Sunarto selaku Penghulu Kampung Berumbung Baru.
- b. Informan pendukung dalam penelitian adalah Aparatur Pemerintahan Kampung Berumbung Baru yang terdiri dari Kerani, Kepala Urusan (KAUR), Bapekam, sedangkan kelembagaan ekonomi adalah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Makmur dan Ketua BUMKAM Mekar Jaya serta masyarakat Kampung Berumbung Baru.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa informasi dari hasil proses wawancara dan informasi penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian serta didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis seperti:

1. Hasil wawancara secara langsung dengan informan.
2. Data dan fakta yang ada dilapangan yang diperlukan secara hasil wawancara upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang

tersedia seperti buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini, mengenai upaya Kampung Berumbung Baru dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian yaitu Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara mendalam sering digabungkan dengan teknik observasi. Karena selama pengamatan berlangsung, peneliti pun melakukan wawancara dengan informan. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan untuk memperoleh data dan memahami upaya Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan.

c. Dokumentasi

Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen, baik dokumen tertulis, meliputi buku-buku relevan,

peraturan-peraturan, foto dan data yang relevan dengan penelitian. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh dari data primer maupun sekunder, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang berupa uraian, penulis berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian digunakanlah dengan melakukan teknik Triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, berarti teknik ini mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tujuan dari Triangulasi yaitu untuk mengetahui data yang diperoleh meluas dan tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik Triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan konsisten, tuntas dan pasti.

HASIL PENELITIAN

1. Upaya Kampung Berumbung Baru dalam Mewujudkan *Good Governance* di

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

a. Akuntabilitas

Dari hasil hasil penelitian dapat dilihat bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa upaya yang dilakukan Pemerintah Kampung Berumbung Baru adalah terlebih dahulu menyediakan tiga dokumen perencanaan yaitu RPJMKam, RKPKam dan APBKam. Secara legalitas dokumen perencanaan ini telah diatur dalam Peremendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dokumen perencanaan adalah dasar bagi pengelolaan keuangan desa tanpa dokumen tersebut desa tidak diperbolehkan dalam mengelola keuangan. Selain itu, jenis dokumen perencanaan harus dilegalisasi melalui peraturan kampung. Tanpa peraturan kampung, ketiga dokumen tersebut tidak akan bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, upaya Pemerintah Kampung terus berupaya membangun sinergitas yang baik dengan BAPEKAM dan tim penyusun agar tidak ada konflik antar kelembagaan.

b. Partisipasi Masyarakat

Menurut analisis penulis mengenai upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak diketahui bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui tata kelola pemerintahan Kampung Berumbung Baru dilakukan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan selalu melibatkan setiap unsur masyarakat melalui forum musyawarah mulai dari tingkat RT, Dusun sampai level tertinggi kampung

(Musrenbangkam). Hal ini berpengaruh baik kepada keterlibatan dan kepedulian masyarakat melalui partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi (fisik dan non fisik) terhadap pembangunan yang ada di Kampung Berumbung Baru.

c. Transparansi

Menurut analisis penulis bahwa bahwa pemerintah Kampung Berumbung Baru berupaya secara pro aktif memberikan informasi dalam proses pembangunan kampung secara transparan kepada masyarakat, karena pemerintah kampung sangat berharap dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan yang berkualitas saat sebelum maupun sesudah Musrenbang kampung. Transparansi tersebut dilakukan saat pra maupun pasca musrenbangkam. Informasi itu ada mulai pada tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

d. Responsivitas

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Upaya yang dilakukan Pemerintah Kampung Berumbung Baru untuk meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kampung Berumbung Baru melalui pelatihan-pelatihan dan studi banding. Penghulu Kampung bertekad menjadikan Kampung Berumbung Baru sebagai kampung terbaik dengan kualitas pelayanan yang PRIMA. Saat ini Aparatur Pemerintah Kampung Berumbung Baru dapat menerapkan Pelayanan yang cepat kepada masyarakat hanya dengan waktu 1 menit selesai di kantor kampung dengan penerapan inovasi-inovasi EGovernment berupa

penerapan aplikasi SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa).

2. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Upaya Kampung Berumbung Baru Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

a. Kepemimpinan Penghulu Kampung

Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Penghulu Kampung Berumbung Baru sebagai penyelenggara pemerintahan, telah menjabat selama 2 (dua) periode. Bapak Sunarto sebagai Penghulu Kampung Berumbung Baru dalam menyelenggarakan pemerintahan, berhasil menghantarkan Kampung Berumbung Baru menjadi Kampung yang berprestasi, bahkan mendapatkan juara I terbaik Nasional mewakili Provinsi Riau pada tahun 2015.

Penghulu Kampung Berumbung Baru memberikan pengaruh besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam semua proses tahapan pembangunan Kampung. Penghulu Kampung Berumbung Baru menerapkan Tipe Kepemimpinan Inovatif-Progresif sehingga mendapat kepercayaan (*trust*) dan dukungan (*support*) dari masyarakat Kampung dalam mewujudkan program-program pembangunan Kampung.

b. Potensi Kampung

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Potensi yang ada di Kampung Berumbung Baru terdiri dari dua faktor yaitu potensi fisik berupa kebun kelapa sawit dan perangkat kampung sebagai potensi non fisik. Luas kebun kelapa sawit Kampung Berumbung Baru adalah 1.135 Hektar. Salah satu faktor

keberhasilan Kampung Berumbung Baru dalam mewujudkan *good governance* adalah adanya potensi kebun kelapa sawit yang selama ini menjadi mayoritas penghasilan masyarakat Kampung Berumbung Baru. Potensi tersebut telah meningkatkan perekonomian mayoritas masyarakat dalam kehidupan yang sejahtera. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat telah berdampak pada tingginya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bentuk uang maupun tenaga dalam peningkatan pembangunan yang ada di Kampung Berumbung Baru secara mandiri. Begitu pula peternakan di Kampung Berumbung Baru menjadi Keunggulan, kelompok peternak dapat menghasilkan pupuk limbah padat dan cair dengan kapasitas produksi 60 Ton/tahun.

Sedangkan potensi non fisik Kampung Berumbung Baru yaitu Perangkat Kampung, merupakan salah satu unsur penting yang bekerja secara maksimal menjadi sumber keberhasilan suatu kampung dalam konteks ketertiban serta kelancaran tata kelola pemerintahan di Kampung Berumbung Baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Upaya Kampung Berumbung Baru Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Dayun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas, yaitu upaya pertanggungjawaban dalam tata kelola pemerintahan Kampung Berumbung Baru dalam mengelola keuangan kampung telah diterapkan dengan baik

melalui siklus pengelolaan keuangan kampung, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung kepada masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya penerapan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa) untuk mempermudah tahapan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- b. Partisipasi masyarakat, yaitu upaya tata kelola pemerintahan Kampung Berumbung Baru dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan selalu melibatkan setiap unsur masyarakat melalui forum musyawarah mulai dari tingkat RT, Dusun sampai level tertinggi kampung (Musrenbangkam). Hal ini berpengaruh baik kepada keterlibatan dan kepedulian masyarakat melalui partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi (fisik dan non fisik) terhadap pembangunan yang ada di Kampung Berumbung Baru.
- c. Transparansi, yaitu upaya keterbukaan informasi pemerintah Kampung Berumbung kepada masyarakat dalam setiap program pembangunan dimulai pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah Kampung Berumbung Baru pro aktif menyampaikan pada saat musyawarah kampung berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi kepada masyarakat. Adapun inovasi yang telah dilakukan dalam transparansi

pelayanan adalah menerapkan standar pelayanan non perizinan paten.

- d. Responsivitas, yaitu kemampuan pemerintah kampung dalam menampung aspirasi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Makmur dan pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sumber Rezeki. Bidang penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan inovasi pelayanan prima (1 menit selesai) kepada masyarakat. Bidang kesehatan masyarakat diwujudkan dalam program kampung siaga. Sedangkan bidang ketertiban dan keamanan masyarakat diwujudkan melalui program SISKAMLING.

Saran

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, penulis memberikan saran-saran yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai kampung *labsite* untuk model percontohan pembangunan bagi desa-desa yang membutuhkan dukungan *political will*, Eksistensi Kampung Berumbung Baru harus terus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Program berupa inovasi-inovasi harus terus diciptakan sebagai upaya terdepan dalam membangun kemandirian ekonomi serta pembangunan kampung yang

berdasarkan atas prinsip-prinsip *good governance* demi kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerintah Kampung Berumbung Baru sebaiknya mengefektifkan pengelolaan dan publikasi *website* kampung sebagai media transparansi kepada masyarakat yang tentunya didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang teknologi informasi.
3. Saran untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya Kampung Berumbung Baru mewujudkan *good governance* di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, diketahui bahwa kepemimpinan Penghulu Kampung merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan Kampung Berumbung Baru. Maka dari itu penulis menyarankan kepada masyarakat untuk memilih kembali penghulu kampung yang memiliki jiwa kepemimpinan *inovatif-progresif* yaitu memaknai pemerintahan kampung sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja agar eksistensi Kampung Berumbung Baru sebagai kampung terbaik bisa dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan kampung. Alasan ini dikarenakan pada tahun 2020, masa tugas penghulu kampung yang saat ini telah menjabat selama 2 (dua) akan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Basri. 2007. *Kepemimpinan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- _____. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kartini. 2011. *Perilaku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koiman, Jan. 2009. *Governing As Governance*. Bandung: Alfabeta.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Rosidi, Abidarin. 2013. *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (keperintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2012. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2015, *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Taufik. 2013. *Sisitem Informasi Manajemen Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasistiono, Sadu. 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.

DOKUMEN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembang Desa dan Kelurahan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Kampung Adat di Kabupaten Siak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.
4. Peraturan Bupati Siak Nomor 96 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung